AGENDA PENTING
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2024

NO	KODE	URAIAN	BIDANG	Target/Capaian	JADWAL PELAKSAAN TAHUN 2024											
					JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	2	3	4	5	6											
1	02	Tersedianya kader pemerintahan dalam negeri yang unggul, professional, berdaya saing dan berintegritas	IPDN		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	02.01	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	IPDN	18%						✓	✓	✓	✓	✓		
3	02.02	Persentase lulusan dengan Predikat Cumlaude	IPDN	5% (D4) 5% (S2)						✓	✓	✓	✓	✓		
4	02.03	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	IPDN	3,6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	02.04	Jumlah Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPDN dalam Jurnal Nasional/Internasional Terakreditasi	IPDN	24 Publikasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	02.05	Persentase Penerapan Smart Campus di lingkungan IPDN	IPDN	75%	✓	✓	✓	✓	✓							
7	06	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Setjen													
8	06.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian DalamNegeri	Setjen	Nilai 85,01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	06.02	Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Setjen	50 Unit Kerja							✓	✓	✓	✓	✓	
10	06.03	Indeks peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri	Setjen	4,20 (sangat baik)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	06.04	Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri	Setjen	WTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	06.05	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri	Setjen	BB						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	06.06	Indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Dalam Negeri	Setjen	Nilai 3,5				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	06.07	Indeks keterbukaan informasi publik Kementerian Dalam Negeri	Setjen	Nilai 91,7								✓	✓	✓	✓	✓
15	06.08	Nilai Penerapan Sistem Merit di lingkungan Kemendagri menuju Birokrasi kelas dunia	Setjen	Nilai 345		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	06.09	Jumlah Rancangan peraturan perundang-undangan dalam Prosundagri yang diselesaikan	Setjen	40 Ranc PerUU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	06.10	Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Setjen	90 Nilai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	06.11	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Dalam Negeri (skala 1-5)	Setjen	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

19	06.12	Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Dalam Negeri	Setjen	Level 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	06.13	Indeks Manajemen Risiko Kementerian DalamNegeri	Setjen	Nilai 3,50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	01	Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia	Ditjen Polpum													
22	01.01	Indeks Demokrasi Indonesia	Ditjen Polpum	79.58		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
23	01.02	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	Ditjen Polpum	79,50%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	01.03	Indeks Kinerja Ormas	Ditjen Polpum	Nilai 66			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
25	02	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Ditjen Polpum													
26	02.05	Indeks Harmoni Indonesia	Ditjen Polpum	Nilai 6,3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	03	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Ditjen Polpum													
28	03.01	Indeks Kewaspadaan Nasional	Ditjen Polpum	64						✓	✓	✓				
29	04	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Ditjen Polpum													
30	04.01	Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori "baik"	Ditjen Polpum	150 Daerah					✓	✓	✓	✓	✓	✓		
31	05	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Itjen													
32	05.01	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 jam pelajaran (JP) per tahun	Itjen	75%		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
33	05.02	Tingkat kapabilitas auditor Kementerian Dalam Negeri	Itjen	Level 3						✓	✓	✓	✓			
34	05.03	Tingkat kapasitas PPUPD secara nasional	Itjen	Level 3						✓	✓	✓	✓			
35	05.04	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni	Itjen	Nilai 3,60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	06	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Ditjen Otda													
37	06.01	Indeks Kepatuhan penyusunan produk hukum daerah	Ditjen Otda	Nilai 85	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	07	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif dan inovatif	Ditjen Otda													
39	07.02	Nilai Kinerja Kemitraan KDH dan DPRD	Ditjen Otda	Sedang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	07.03	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Ditjen Otda	Nilai 4,00 (Tinggi)												
41	07.04	Persentase Capaian penerapan SPM di Daerah	Ditjen Otda	100%		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
42	07.05	Indeks sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Ditjen Otda	Nilai 100 (Sinkron)				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
43	07.06	Persentase desa dengan nilai Indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai "Baik"	Ditjen Otda	4%					✓	✓	✓	✓	✓	✓		
44	07.07	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Ditjen Otda	Nilai 66.00						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	07.08	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	Ditjen Otda	36%						✓	✓	✓	✓			
46	07.09	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Ditjen Otda	Nilai 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	07.10	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Ditjen Otda	Nilai 90 (A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

48	08	Terjaminnya hak-hak keperdataan wetiap warna negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Ditjen Dukcapil													
49	08.01	Peningkatan cakupan serta layanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil	Ditjen Dukcapil	100% cakupan kemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	08.02	Jumlah Lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)	Ditjen Dukcapil	1.500 Lembaga Pengguna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	09	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Ditjen Bina Adwil													
52	09.01	Indeks tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Ditjen Bina Adwi	Nilai 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	10	Meningkatnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Setjen													
54	10.01	Indeks reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Setjen	Nilai 85,01							✓	✓	✓	✓	✓	
55	11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Itjen													
56	11.01	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Itjen	Nilai 100									✓	✓	✓	✓
57	11.02	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Itjen	Nilai 85	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	12	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitisan dan pengembagan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri	BSKDN													
59	12.01	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri	BSKDN	45%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓